

Analysis of Planning, Implementation, Management, Supervision, and Financial Accountability in Education at SD Negeri 155 Danau Saung Tantan

Dian Margaretha¹, Rahmat Pebrian Jamil², Ira Elfina³, Ali Idrus⁴

¹Universitas Jambi, Jambi Indonesia

²Universitas Jambi, Jambi Indonesia

³Universitas Jambi, Jambi Indonesia

⁴Universitas Jambi, Jambi Indonesia

Corresponding author email: dianmarg21mj@gmail.com

Abstract—Introduction/Main Objectives: This study aims to analyze the education funding cycle, which includes budget planning, budget implementation, financial management, budget oversight, and financial accountability at SD Negeri 155/IX Danau Saung Tantan. **Research Methods:** A qualitative case study approach was used. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis.

Finding/Results: The results of the study indicate that the education financing cycle at the school has been carried out procedurally; however, it still faces a number of challenges, such as planning that is not yet fully based on actual needs, a financial management system that remains manual, delays in fund disbursement, suboptimal oversight, and a need to improve transparency and accountability toward all stakeholders. **Conclusion:** This study recommends optimizing needs-based planning, strengthening continuous oversight, utilizing information technology such as ARKAS, and increasing the disclosure of financial information to the public.

Keywords: Education Financing Cycle¹; Budget Oversight²; Financial Accountability³; Transparency⁴; Accountability⁵

Abstrak—Pendahuluan/Tujuan Utama: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis siklus pembiayaan pendidikan yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengelolaan keuangan, pengawasan anggaran, serta pertanggungjawaban keuangan di SD Negeri 155/IX Danau Saung Tantan.

Metode Penelitian: Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. **Temuan/Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa siklus pembiayaan pendidikan di sekolah tersebut telah berjalan secara prosedural, namun masih menghadapi sejumlah tantangan seperti perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil, sistem pengelolaan keuangan yang masih manual, keterlambatan pencairan dana, pengawasan yang belum optimal, serta tingkat transparansi dan akuntabilitas yang perlu ditingkatkan kepada seluruh pemangku kepentingan. **Kesimpulan:** Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi perencanaan berbasis kebutuhan, penguatan pengawasan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi seperti ARKAS, serta peningkatan keterbukaan informasi keuangan kepada publik.

Kata kunci: Siklus Pembiayaan Pendidikan¹; Pengawasan Anggaran²; Pertanggungjawaban Keuangan³; Transparansi⁴; Akuntabilitas⁵

1. PENDAHULUAN

Pendidikan berkualitas merupakan kebutuhan utama dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing. Kualitas pendidikan dapat diartikan sebagai tingkat terpenuhinya standar pendidikan yang mencerminkan baiknya proses maupun hasil pembelajaran dalam memenuhi kebutuhan dan

harapan peserta didik, masyarakat, serta tuntutan dunia kerja dan perkembangan zaman. Menurut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (2025), melalui visi "Pendidikan Bermutu untuk Semua", terdapat sejumlah aspek penting yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, proses



pembelajaran yang adaptif dan bermakna, pemerataan layanan pendidikan, pembiayaan yang bersifat afirmatif, layanan pendidikan yang inklusif, serta pengembangan talenta unggul (Kirmandi, dkk., 2025).

Proses pendidikan tidak dapat berlangsung secara optimal tanpa adanya dukungan pembiayaan yang memadai untuk menjamin keberlanjutannya (Yulianti, dkk., 2017 dalam Susanto dan Rahma, 2023). Pembiayaan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan sistem pendidikan. Keterbatasan dana dapat menghambat jalannya proses pendidikan sehingga tidak berjalan secara efektif. Untuk itu diperlukan pengelolaan dana keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dengan proses yang sistematis mulai dari perencanaan anggaran hingga pertanggungjawaban keuangan.

Berbagai permasalahan masih kerap ditemukan pada jenjang sekolah dasar, khususnya yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan pendidikan. Pengelolaan pembiayaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sekolah dasar sering kali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Permasalahan pembiayaan tidak hanya berhenti pada besaran dana, tetapi juga menyangkut perencanaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil sekolah, sehingga pembiayaan pendidikan cenderung bersifat administratif dan tidak mendukung secara langsung peningkatan mutu pembelajaran (Sukri, dkk., 2024). Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya pengawasan dalam pembiayaan pendidikan yang dapat memicu potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran, serta pertanggungjawaban keuangan yang belum optimal dapat mengurangi tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga pendidikan kepada para pemangku kepentingan (Rizki Ananda, dkk., 2025).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif dalam memahami pembiayaan pendidikan, yaitu melalui konsep siklus pembiayaan pendidikan. Menurut Ali Idrus, dkk. (2025), siklus pembiayaan dalam pendidikan merupakan landasan yang penting dalam pengelolaan keuangan yang efektif dan bertanggung jawab dalam institusi pendidikan. Setiap tahapan dalam siklus ini, yang dimulai dari perencanaan alokasi anggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan

pertanggungjawaban, memiliki peran strategis dalam tercapainya tujuan pendidikan.

Sebagai salah satu satuan pendidikan dasar, SD Negeri 155/IX Danau Saung Tantan memiliki peran penting dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan secara profesional. Sekolah dituntut untuk mampu menyusun perencanaan anggaran yang tepat, melaksanakan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengelola keuangan secara tertib dan efisien, serta melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan secara transparan. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai dinamika dan kendala yang berkaitan dengan pelaksanaan setiap tahapan dalam siklus pembiayaan pendidikan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, pengelolaan pembiayaan di tingkat sekolah dasar tidak dapat dipisahkan dari pemahaman yang utuh mengenai siklus pembiayaan itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis siklus pembiayaan pendidikan yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengelolaan keuangan, pengawasan anggaran, serta pertanggungjawaban keuangan dalam konteks penyelenggaraan pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana setiap tahapan dalam siklus pembiayaan pendidikan yang dilaksanakan di tingkat sekolah dasar, khususnya di SD Negeri 155/IX Danau Saung Tantan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses dan dinamika dalam siklus pembiayaan pendidikan yang meliputi perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan pembiayaan, pengawasan anggaran, serta pertanggungjawaban keuangan di tingkat satuan pendidikan.

Lokasi penelitian dilaksanakan di SD Negeri 155/IX Danau Saung Tantan. Subjek penelitian terdiri dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, antara lain Kepala Sekolah, bendahara sekolah, guru, serta pihak terkait lainnya yang memahami proses pengelolaan keuangan sekolah.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: (1) Wawancara, dilakukan

dengan Kepala Sekolah, bendahara sekolah, guru, dan pihak terkait lainnya (komite sekolah) untuk memperoleh informasi terkait proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan; (2) Observasi, pengamatan langsung terhadap praktik pengelolaan keuangan di sekolah; dan (3) Studi Dokumentasi, analisis berupa pengumpulan data terhadap dokumen RKAS, laporan penggunaan dana, serta program kegiatan sekolah.

Data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman & Saldana, 2014). Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, sebagaimana yang direkomendasikan dalam penelitian kualitatif untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan (Sugiyono, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 HASIL

A. Perencanaan Anggaran Pendidikan

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, perencanaan anggaran di sekolah disusun melalui dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang mengacu pada petunjuk teknis serta kebutuhan sekolah. Proses penyusunan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk guru dan komite sekolah.

"Perencanaan anggaran kami lakukan di akhir tahun melalui penyusunan RKAS, biasanya melibatkan guru dan komite sekolah agar sesuai dengan kebutuhan sekolah. (KS)"

"Kami dari komite sekolah ikut diundang dalam rapat penyusunan RKAS, memberikan masukan terkait kebutuhan siswa dan kondisi sekolah. (Komite Sekolah)"

"Dalam perencanaan, kami mengusulkan kebutuhan pembelajaran di kelas, tetapi tetap disesuaikan dengan dana yang tersedia. (G)"

Meskipun proses perencanaan telah melibatkan berbagai pihak, dalam praktiknya perencanaan masih cenderung menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil sekolah.

B. Pelaksanaan Anggaran Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pendidikan dilakukan

sesuai RKAS yang telah disusun. Seorang guru menyampaikan:

"Pelaksanaan kegiatan biasanya menggunakan anggaran yang sudah direncanakan, tetapi terkadang terkendala karena dana belum cair. (G)"

Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala teknis seperti keterlambatan pencairan dana sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan atau program sekolah.

C. Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Hasil wawancara dengan bendahara sekolah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan meliputi pencatatan transaksi, pengarsipan dokumen, serta pengelolaan dana sesuai ketentuan.

"Setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum secara manual terlebih dahulu dan dilengkapi dengan bukti transaksi sesuai aturan, tetapi terkadang terkendala karena dana belum cair sehingga kegiatan harus menunggu. Selain itu, aturan pelaporan yang sering berubah dan tugas bendahara yang cukup banyak, sehingga pencatatan tidak selalu bisa langsung terselesaikan. (BS)"

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan sudah berjalan secara administratif, namun terkendala dengan keterlambatan pencairan dana serta beban kerja bendahara yang cukup tinggi. Pengelolaan yang masih dilakukan secara manual juga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan.

D. Pengawasan Anggaran Pendidikan

Pengawasan anggaran dilakukan oleh pihak internal sekolah seperti kepala sekolah, serta pihak eksternal seperti dinas pendidikan dan inspektorat. Kepala sekolah menyatakan bahwa:

"Kami melakukan pengawasan secara internal terhadap penggunaan dana agar sesuai dengan rencana yang telah dibuat, serta ada juga pemeriksaan dari pihak luar seperti dinas pendidikan, biasanya dilakukan secara berkala. (KS)"

Berdasarkan wawancara dengan guru, disampaikan bahwa:

"Kami sebagai guru hanya mengetahui penggunaan dana secara umum, belum secara rinci. (G)"

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan telah dilakukan, namun belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal keterlibatan seluruh stakeholder dan evaluasi yang berkelanjutan. Komite sekolah sebagai representasi masyarakat pun belum dilibatkan secara aktif dalam mekanisme pengawasan secara rutin.

E. Pertanggungjawaban Keuangan Pendidikan
Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban keuangan dilakukan melalui penyusunan laporan penggunaan dana yang dilaporkan kepada pihak terkait.

"Laporan keuangan kami buat sesuai format yang ditentukan dan dilaporkan setiap tahap pencairan dana. (BS)"

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan telah berjalan sesuai prosedur, meskipun masih perlu peningkatan dalam aspek transparansi kepada seluruh stakeholder, termasuk guru, orang tua siswa, dan masyarakat luas.

Tabel 1. Instrumen Wawancara Penelitian

No	Item	Penyusunan RKAS	Kepala Sekolah	Bagaimana proses penyusunan RKAS di sekolah?
1	Perencanaan Anggaran	Partisipasi Stakeholder	Komite Sekolah	Apakah komite dilibatkan dalam penyusunan RKAS?
		Kesesuaian kebutuhan	Guru	Apakah anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran?
2	Pelaksanaan Anggaran	Pelaksanaan Program	Guru	Bagaimana pelaksanaan kegiatan berdasarkan anggaran?
		Kendala Teknis	Bendahara	Apa kendala dalam pengelolaan keuangan?
3	Pengelolaan Keuangan	Pencatatan & Dokumentasi	Bendahara	Bagaimana proses pencatatan keuangan sekolah?
		Penggunaan Teknologi	Bendahara	Apakah pengelolaan sudah menggunakan sistem digital?
4	Pengawasan	Pengawasan Internal	Kepala Sekolah	Bagaimana pengawasan penggunaan anggaran dilakukan?
		Pengawasan Eksternal	Bendahara	Apakah ada pengawasan dari pihak luar (dinas/inspektorat)?
		Keterlibatan Stakeholder	Guru	Apakah guru mengetahui penggunaan anggaran secara rinci?
5	Pertanggungjawaban	Pelaporan Keuangan	Bendahara	Bagaimana proses pelaporan keuangan dilakukan?
		Transparansi	Komite Sekolah	Apakah komite menerima laporan keuangan secara berkala?
		Akuntabilitas Publik	Kepala Sekolah	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada publik?

Tabel 2. Sintesis Temuan Penelitian

No	Item	Penyusunan RKAS	Kepala Sekolah	Bagaimana proses penyusunan RKAS di sekolah?
1	Perencanaan Anggaran	Penyusunan RKAS melibatkan kepala sekolah, guru, dan komite secara partisipatif	Perencanaan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil karena keterbatasan dana	Optimalisasi perencanaan berbasis prioritas program dan kebutuhan nyata sekolah
2	Pelaksanaan Anggaran	Pelaksanaan mengacu pada RKAS yang disusun bersama	Keterlambatan pencairan dana menghambat kelancaran program	Perbaikan mekanisme koordinasi pencairan dana antara sekolah dan dinas
3	Pengelolaan Keuangan	Pencatatan melalui buku kas umum dan bukti transaksi	Sistem masih manual, beban kerja bendahara tinggi, risiko kesalahan pencatatan	Peningkatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi (ARKAS)
4	Pengawasan Anggaran	Pengawasan internal oleh kepala sekolah dan eksternal oleh dinas pendidikan	Pengawasan belum optimal; evaluasi berkelanjutan dan keterlibatan stakeholder masih terbatas	Penguatan sistem pengawasan berkala dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
5	Pertanggungjawaban Keuangan	Laporan keuangan disusun sesuai format dan dilaporkan per tahap pencairan	Transparansi kepada stakeholder (guru, komite, orang tua) masih terbatas	Peningkatan keterbukaan informasi, publikasi laporan, dan akuntabilitas publik

3.2 PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan siklus pembiayaan pendidikan di SD Negeri 155/IX Danau Saung Tantan telah mencakup tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan. Menurut Ali Idrus, dkk. (2025) dalam buku Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan, siklus pembiayaan dalam pendidikan menjadi landasan utama bagi pengelolaan keuangan yang efektif dan bertanggung jawab di institusi pendidikan. Tahapan dalam siklus ini dimulai dari perencanaan alokasi anggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban, yang keseluruhannya memiliki peran strategis dalam memastikan tercapainya tujuan pendidikan.

1. Perencanaan Anggaran

Pada tahap perencanaan, keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan RKAS menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip partisipatif. Hal ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, perencanaan anggaran masih belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil karena harus menyesuaikan dengan keterbatasan dana yang tersedia.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyasa (2020), tahapan pertama dalam perencanaan anggaran yang ideal adalah mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pendidikan, di mana proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan esensial pendidikan terpenuhi sesuai dengan visi dan misi institusi pendidikan. Sejalan dengan temuan ini, Aditya, dkk. (2023) menyatakan bahwa satuan pendidikan perlu menyusun rencana penggunaan dana BOS secara matang dan sistematis, dengan mencakup pengidentifikasian kebutuhan utama yang harus diprioritaskan.

Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Devina, dkk. (2024) mengenai tahapan dalam pengelolaan dana BOS yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran, serta pertanggungjawaban anggaran yang mencakup pengawasan dan pelaporan tanggung jawab keuangan. Proses penyusunan RKAS yang diatur sesuai prosedur inventarisasi program, penyusunan program aksi, dan penetapan anggaran merupakan bagian dari tata kelola yang baik (Rachmawati, 2023).

2. Pelaksanaan dan Pengelolaan Keuangan

Dalam tahap pelaksanaan dan pengelolaan keuangan, sistem administrasi keuangan telah berjalan sesuai dengan ketentuan, ditandai dengan adanya pencatatan dan dokumentasi yang tertib. Akan tetapi, kendala eksternal seperti keterlambatan pencairan dana masih menjadi hambatan utama yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program sekolah.

Kendala yang umum muncul dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan meliputi keterbatasan likuiditas, keterlambatan distribusi dana, serta rendahnya pemahaman staf terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang baik. Apabila tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini berpotensi menurunkan efisiensi penggunaan anggaran dan mengganggu kelancaran kegiatan pendidikan (Kemendikbud, 2022).

Berdasarkan penelitian Polachek & Lee (2014, dalam Taufik, dkk., 2022), terdapat hubungan antara ketersediaan anggaran sekolah dengan hasil belajar siswa. Besarnya pengeluaran anggaran bukan satu-satunya faktor penentu, namun efisiensi dan efektivitas penggunaannya turut menentukan capaian siswa. Sementara itu, menurut Kenayathulla & Banu (2014, dalam Taufik, dkk., 2022), pengelolaan pembiayaan

pada sekolah dasar negeri perlu dilakukan secara efisien mengingat sumber dana yang umumnya hanya berasal dari dana BOS.

Dalam konteks digitalisasi, pemanfaatan aplikasi ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) telah terbukti dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Mubaro, dkk. (2025) menyatakan bahwa transformasi digital melalui ARKAS mampu mempercepat pelaporan dan meminimalkan kesalahan administratif. Meskipun demikian, masih banyak operator sekolah yang belum memiliki literasi digital yang memadai untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal (Rusmiyati, dkk., 2025).

3. Pengawasan Anggaran

Pada aspek pengawasan, meskipun telah dilakukan secara internal oleh kepala sekolah dan eksternal oleh dinas pendidikan, pengawasan belum sepenuhnya optimal karena belum melibatkan seluruh stakeholder secara aktif dan belum dilaksanakan evaluasi secara berkelanjutan. Guru sebagai salah satu komponen penting sekolah hanya mengetahui penggunaan dana secara umum, tanpa akses informasi yang rinci.

Menurut Simanjuntak, dkk. (2024), pengawasan yang efektif mencakup dua dimensi utama, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan melalui evaluasi berkala oleh kepala sekolah dan bendahara, sementara pengawasan eksternal dilaksanakan oleh inspektorat dan dinas pendidikan. Inspektorat tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan arahan kepada sekolah agar dapat menggunakan keuangan dengan bijak sesuai dengan juknis BOS untuk menghindari penyalahgunaan dana (Jurnal Jendela Pendidikan, 2023).

Penelitian Cendekia (2025) menegaskan bahwa audit eksternal yang dilaksanakan oleh lembaga independen seperti BPK, BPKP, atau Inspektorat memiliki kekuatan pada sisi objektivitas dan kredibilitas hasil pemeriksaannya. Audit eksternal mampu memberikan perspektif yang lebih netral dan menjadi tolok ukur akuntabilitas publik. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme pengawasan yang terlembaga, baik secara internal maupun eksternal, merupakan pilar penting dalam

menjaga integritas pengelolaan keuangan pendidikan.

Lebih lanjut, keterlibatan aktif komite sekolah dalam fungsi pengawasan perlu diperkuat. Menurut Rachmawati (2023), transparansi pengelolaan dana BOS diwujudkan melalui perencanaan yang melibatkan komite sekolah, guru, dan tenaga kependidikan secara terbuka, sedangkan akuntabilitas tercermin dari pertanggungjawaban laporan secara online maupun offline. Tanpa adanya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, fungsi kontrol sosial atas penggunaan anggaran tidak dapat berjalan secara efektif.

4. Pertanggungjawaban Keuangan

Sementara itu, dalam pertanggungjawaban keuangan, sekolah telah melaksanakan pelaporan sesuai prosedur yang berlaku. Namun, tingkat transparansi kepada stakeholder seperti guru, komite sekolah, dan orang tua siswa masih perlu ditingkatkan agar akuntabilitas pengelolaan keuangan menjadi lebih baik.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan pendidikan merupakan faktor kunci yang secara positif memengaruhi efektivitas pengelolaan dana sekolah. Penelitian Sudyartini, dkk. (2024) yang dilakukan pada SD dan SMP di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki dampak positif terhadap keefektifan dalam pengelolaan dana BOS. Semakin terbuka pihak sekolah dalam menyampaikan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana kepada masyarakat dan komite sekolah, maka tingkat kepercayaan meningkat dan penggunaan dana menjadi lebih efisien (Jurnal Ranah Research, 2025).

Menurut penelitian Sahdan (2023) yang dipublikasikan dalam *Indonesian Journal of Educational Management*, efektivitas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS secara signifikan berkontribusi pada peningkatan mutu layanan pendidikan. Bentuk akuntabilitas publik yang konkret dapat diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan di papan informasi sekolah, rapat rutin bersama komite, serta penyampaian laporan realisasi anggaran secara periodik kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam aspek pertanggungjawaban berbasis digital, penggunaan aplikasi ARKAS telah menjadi instrumen penting dalam mendukung

transparansi dan akuntabilitas. Azahra & Dzikrayah (2025) dalam penelitiannya mengenai implementasi ARKAS 4.0 menyatakan bahwa sistem digital tersebut mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sekolah secara signifikan. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas teknis SDM pengelola keuangan dan komitmen pimpinan sekolah dalam mendorong budaya keterbukaan informasi.

Untuk mencapai efektivitas manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan, terdapat empat pilar utama yang harus dipenuhi, yaitu transparansi, standar kinerja, partisipasi, dan regulasi. Dalam setiap tahapan proses manajemen keuangan pendidikan, indikator keberhasilan harus didefinisikan dengan jelas sehingga dapat memenuhi tuntutan akuntabilitas dari berbagai pihak seperti orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah (Jurnal Pendidikan dan Konseling, 2023).

5. Analisis Keterkaitan Antar Tahap Siklus Pembiayaan

Secara keseluruhan, siklus pembiayaan pendidikan di SD Negeri 155/IX Danau Saung Tantan menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antar tahapan. Kelemahan pada satu tahap akan berdampak pada tahap berikutnya. Perencanaan yang tidak sepenuhnya berbasis kebutuhan riil, misalnya, akan menyebabkan pelaksanaan yang kurang optimal. Demikian pula, ketika pengelolaan keuangan masih bersifat manual dan pengawasan tidak dilakukan secara berkelanjutan, maka pertanggungjawaban keuangan pun berpotensi kurang akuntabel.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan sistemik pada seluruh tahapan siklus pembiayaan secara terintegrasi. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta komitmen kelembagaan terhadap prinsip good governance menjadi faktor kunci keberhasilan pengelolaan keuangan pendidikan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Rusmiyati, dkk., 2025).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, perencanaan anggaran di SD Negeri 155/IX Danau Saung Tantan telah dilaksanakan secara partisipatif melalui

penyusunan RKAS yang melibatkan kepala sekolah, guru, dan komite sekolah, namun belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil karena keterbatasan dana yang tersedia.

Kedua, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan sekolah telah berjalan sesuai prosedur administratif, namun masih menghadapi kendala keterlambatan pencairan dana, beban kerja bendahara yang tinggi, serta sistem pencatatan yang masih manual dan rentan terhadap kesalahan.

Ketiga, pengawasan anggaran telah dilakukan secara internal maupun eksternal, namun belum optimal karena terbatasnya keterlibatan seluruh stakeholder, minimnya evaluasi berkelanjutan, dan kurangnya akses informasi anggaran bagi guru dan komponen sekolah lainnya.

Keempat, pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai format dan ketentuan yang berlaku, namun transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan masih perlu ditingkatkan guna memperkuat kepercayaan publik dan akuntabilitas lembaga pendidikan.

4.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagi lembaga pendidikan, diharapkan dapat mengoptimalkan proses perencanaan berbasis kebutuhan riil melalui analisis kebutuhan yang sistematis sebelum penyusunan RKAS. Selain itu, pemanfaatan aplikasi ARKAS perlu segera diimplementasikan secara penuh untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. Pengawasan perlu diperkuat dengan melibatkan seluruh stakeholder secara aktif dan dijadwalkan secara berkala, serta publikasi laporan keuangan kepada publik perlu ditingkatkan.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan membandingkan siklus pembiayaan pendidikan di beberapa sekolah dasar di wilayah yang berbeda, serta mengkaji secara lebih mendalam dampak digitalisasi pengelolaan keuangan terhadap kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan dasar.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, F., Rosita, T., & Hidayat, R. (2023). Satuan pendidikan dan pengelolaan dana BOS: Analisis implementasi dan kendala.

Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia, 3(2), 112–125. <https://doi.org/10.53299/jppi.v3i2>

Al-Idaroh. (2023). Pengelolaan pembiayaan pendidikan sekolah dasar negeri. *Al-Idaroh: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 45–62. <https://doi.org/10.29062/al-idaroh>

Aliyah, N., Mus, S., & Irmawati. (2025). Efektivitas penggunaan aplikasi ARKAS dalam pelaporan dana BOS sekolah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 394–399. <https://doi.org/10.journal.ilmudata>

Ananda, R., Hasibuan, A., & Syahputra, F. (2025). Problematika manajemen pembiayaan pendidikan sekolah dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 6(1), 1–14.

Ayu, M. S., Pasla, B. N., Fathiyah, F., Isnaini, L., & Erlinda, N. (2022). Transformational Style of Leadership and Psychological Capital: The Mediating Role of Work Engagement. *Jurnal Prajaiswara*, 3(2), 147–155.

Azahra, H. A. S., & Dzikrayah, F. (2025). Analisis transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) menggunakan sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (ARKAS 4.0). *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 16(11), 1–10. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/musytarineraca/article/view/13630>

Devina, S., Rahardjo, M., & Sulistyorini. (2024). Tahapan pengelolaan dana BOS pada sekolah dasar: Studi komparatif. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 6(1), 98–113.

Idrus, A., Harun, H., & Mardiyah, S. (2025). Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Penerbit Akademik.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). ARKAS dan SIPLah jaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS. Kemendikbud. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/12/arkas-dan-siplah>

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Visi pendidikan bermutu untuk semua: Kebijakan pembiayaan pendidikan afirmatif. Kemendikdasmen.

Kirmandi, Y., Hidayat, R., & Puspita, A. (2025). Analisis kebijakan pembiayaan pendidikan

- bermutu. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(1), 34–49.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mubaro, Y., Wahyudi, T., & Basri, M. (2025). Transformasi digital aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (ARKAS) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(4), 2704–2725. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4557>
- Mulyasa, E. (2020). *Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi*. Remaja Rosdakarya.
- Pasla, B. N., Ayu, M. S., Fathiyah, F., Bailah, B., Rasid, F., & Ubaidillah, U. (2022). Leadership style types: The importance of organizational culture and change management. *Jurnal Prajaiswara*, 3(2), 105–115.
- Rachmawati, U. (2023). Penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS dalam program RKAS di SDN Made 1 Surabaya. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 3(02), 212–219. <https://doi.org/10.57008/jjp.v3i02.442>
- Rusmiyati, L., Harsono, M., & Takdir, M. (2025). Transformasi manajemen keuangan sekolah di era digital: Kajian literatur terhadap efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 5372–5380. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1428>
- Sahdan. (2023). Effectiveness of accountability and transparency of BOS fund management. *Indonesian Journal of Educational Management*, 5(2), 176–186. <https://doi.org/10.52627/ijeam.v5i2.144>
- Simanjuntak, M. N., Nafiati, D. A., & Hendaryati, N. (2024). Menuju pendidikan berintegritas: Studi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. *Journal of Education Research*, 5(4), 4421–4435.
- Sudyartini, N., Rahayu, S., & Wibowo, P. (2024). Pengaruh penerapan akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di Kota Yogyakarta. *Journal on Education*, 6(3), 17807–17816.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukri, M., Fauzan, A., & Irawan, B. (2024). Manajemen pembiayaan pendidikan sekolah dasar: Tantangan dan solusi. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 5(2), 78–91.
- Susanto, H., & Rahma, N. (2023). Pembiayaan pendidikan dan mutu pembelajaran: Kajian sistematis. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(2), 45–58.
- Taufik, M., Prasetyo, A., & Sari, R. (2022). Efisiensi pengelolaan keuangan sekolah dasar negeri. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(1), 21–35.
- Wulaningsih, R., & Asriati, N. (2024). Pengelolaan keuangan pendidikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia*, 4(4), 1723–1732. <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i4.757>